

Pemberdayaan PKK melalui Digitalisasi Administrasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Desa Purbadana Banyumas

Empowerment of the PKK through the Digitalization of Administration and Information Technology-Based Public Services in Purbadana Village, Banyumas

Khayu Rohmi^{*1}, Ranjani², Tissa Silvia³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

Email corresponding: khayu.rohmi@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan administrasi PKK Desa Purbadana yang masih bersifat manual memicu lambatnya layanan, tingginya risiko kehilangan arsip, serta terbatasnya transparansi informasi akibat rendahnya literasi digital para kader. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan *Techno-Social* yang mencakup tiga intervensi utama: implementasi sistem E-Administrasi berbasis *Cloud Storage*, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata kelola arsip digital, dan peningkatan kapasitas SDM kader. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan prinsip *Andragogi* yang direalisasikan melalui tahapan sosialisasi *mindset* digital, instalasi infrastruktur sistem, pelatihan teknis manajemen arsip, serta pendampingan intensif secara *one-on-one*. Hasil kegiatan menunjukkan terciptanya sistem pengelolaan administrasi digital yang terstruktur, tersedianya dokumen SOP dan modul panduan, serta peningkatan keterampilan digitalisasi mandiri sebesar 80% pada para kader PKK. Selain itu, luaran pengabdian ini mencakup publikasi ilmiah di jurnal nasional, pendaftaran ISBN, keikutsertaan dalam seminar nasional, penyusunan profil hasil pengabdian, dan pembuatan video dokumentasi kegiatan. Kata Kunci: E-Administrasi, Kader PKK, Literasi Digital, Participatory Action Research, Techno-Social.

ABSTRACT

The manual administrative management of the Purbadana Village PKK (Family Welfare Empowerment) group resulted in slow service, a high risk of record loss, and limited information transparency due to the cadres' low digital literacy. This community service initiative aimed to address these issues using a techno-social approach comprising three key interventions: implementing a cloud-based e-administration system, developing Standard Operating Procedures (SOPs) for digital record management, and enhancing the cadres' human resource capacity. The implementation employed Participatory Action Research (PAR) and andragogy principles, realized through stages involving fostering a digital mindset, installing system infrastructure, providing technical training on record management, and offering intensive one-on-one mentoring. The results demonstrated the establishment of a structured digital administration system, the availability of SOP documents and guidance modules, and an 80% improvement in the PKK cadres' independent digitization skills. Additionally, the project's outputs included a scientific publication in a national journal, ISBN registration, participation in a national seminar, the compilation of a project profile, and the production of an activity documentation video.

Keywords: E-Administration, PKK Cadres, Digital Literacy, Participatory Action Research, Techno-Social.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai

sebuah organisasi birokrasi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat merupakan badan politik yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dan berhak memperoleh pelayanan dari pemerintah (Panggabean & Meilani, 2023). Digitalisasi menjadi strategi utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi publik. Basyo & Anirwan (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan proses mengubah data fisik menjadi format digital yang dapat diproses menggunakan teknologi informasi. Pada era digitalisasi, pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial secara cepat dengan dukungan teknologi, guna menghadapi tantangan Revolusi Industri 5.0 (Prayana & Yuhertiana, 2024). E-Government merupakan kekuatan yang kuat dalam pembangunan di abad ke-21 melalui layanan pemerintah yang lebih berkualitas dan lebih mudah diakses serta hubungan yang lebih baik antara warga negara dan pemerintahnya (Fang & Ph, 2002; Bao et al., 2023). Namun, realitas di tingkat desa, khususnya Desa Purbadana, Kabupaten Banyumas, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi masih sangat terbatas sehingga berdampak pada lambannya proses administrasi, kurangnya akses informasi, serta rendahnya kualitas layanan publik.

PKK sebagai organisasi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial di tingkat desa seharusnya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. PKK tidak hanya berfungsi sebagai penggerak kesejahteraan keluarga, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam mendukung program pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari tingkat bawah, dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat, dengan tujuan menciptakan keluarga sejahtera melalui kesadaran serta kemampuan yang dimiliki oleh keluarga itu sendiri (Pambudi et al., 2023). PKK ini lebih diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui program-program yang dijalankan (Putri & Jatiningsih, 2020). Salah satu kiat untuk membangun desa yaitu dengan cara menumbuhkan jiwa entrepreneurship dan kreatifitas melalui pengembangan ekonomi kreatif (Hamid and Ikbali, 2017). Sebagai entitas yang berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal (Simanjuntak, Realize, & Handoko, 2019), PKK perlu menyesuaikan diri dengan sistem administrasi yang terstruktur dan efisien (Kalsum, Yamin, & Supriyadi, 2023). Namun, sebagian besar kegiatan PKK masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan

administrasi, pengelolaan data anggota, hingga pelaporan kegiatan. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala seperti proses administrasi yang lambat, kesulitan pengarsipan, kurangnya transparansi, dan minimnya akses informasi bagi masyarakat.

Digitalisasi administrasi dan layanan publik berbasis teknologi informasi merupakan solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan penerapan sistem digital, PKK dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, mendorong transparansi, mempermudah komunikasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Digitalisasi juga sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait transformasi digital desa dalam program Smart Village. Dalam konteks inilah konsep Smart Village menjadi sangat relevan, yakni sebagai upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang berbasis teknologi digital untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Adheitya et al., 2024). Pemanfaatan sistem digital dapat meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses pelaporan, dan mempermudah komunikasi antara kader, peserta, dan pihak puskesmas (Kristania & Yulianti, 2019; Farmani et al., 2021; Kamilah & Ratnasari, 2020; Mulyani et al., 2022; Safitri et al., 2025).

Desa Purbadana memiliki potensi sosial dan ekonomi yang cukup besar dengan PKK yang aktif menjalankan program kesehatan, ekonomi produktif, dan pendidikan. Namun, keterbatasan sarana teknologi dan rendahnya literasi digital menjadi tantangan utama sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan agar kader PKK mampu menguasai teknologi informasi. Proses ini sejalan dengan teori Transformasi Digital (Westerman et al., 2014) yang menekankan pentingnya perubahan budaya organisasi dan pola pikir sumber daya manusia dalam mendukung digitalisasi.

Pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan PKK memiliki relevansi kuat dengan pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks digitalisasi tata kelola di tingkat lokal. Berdasarkan analisis situasi, permasalahan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital kader PKK, tidak adanya sistem administrasi berbasis digital, kurangnya sarana teknologi, minimnya transparansi informasi, dan keterbatasan kapasitas manajerial. Urgensi program ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas PKK agar mampu beradaptasi dengan era digital. Digitalisasi akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi serta mendukung pencapaian SDGs, khususnya kesetaraan gender, inovasi, dan tata kelola yang tangguh. Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan PKK Desa Purbadana memiliki sistem administrasi digital yang terintegrasi, kader PKK mampu

mengoperasikan teknologi informasi, masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih mudah, dan terwujud model pemberdayaan berbasis teknologi yang dapat direplikasi di desa lain. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya desa yang adaptif terhadap teknologi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan modal sosial tersebut dapat menjadi media pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja (Thobias, et all, 2013).

Program ini mendukung tujuan SDGs 5 (Kesetaraan Gender) poin b, yaitu "Memperluas penggunaan teknologi pendukung, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan." Digitalisasi administrasi bukan sekadar mengubah alat kerja, melainkan mentransformasi peran kader PKK (perempuan) dari sekadar pelaksana tugas administratif manual menjadi manajer organisasi yang adaptif terhadap teknologi. Penguasaan cloud storage dan administrasi digital memberikan akses kontrol sumber daya informasi kepada perempuan di Desa Purbadana untuk mengambil keputusan yang lebih strategis. Lebih lanjut, program ini juga mendukung SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) yang berkontribusi pada inovasi infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) di pedesaan. Dengan menghadirkan sistem manajemen berbasis komputasi awan, program ini memperkecil kesenjangan digital (*digital divide*) antara kota dan desa, serta mendorong terciptanya ekosistem inovasi lokal yang sejalan dengan konsep *Smart Village*.

METODE

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan *Adult Learning* (Andragogi). Secara garis besar, metode dibagi menjadi tiga segmen utama:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan tahap persiapan dan koordinasi melalui analisis kebutuhan bersama Ketua PKK Desa Purbadana, pengadaan dan penyiapan laptop berbasis sistem operasi serta perangkat lunak perkantoran original, serta penyusunan modul pelatihan dan instrumen pre-test. Selanjutnya, tahap sosialisasi dilakukan melalui forum diskusi bertajuk "PKK Go Digital: Administrasi Rapi, Kinerja Berprestasi" dan demonstrasi pemecahan masalah untuk membangun kesadaran digital mitra. Pada tahap penerapan teknologi, tim menyerahkan unit laptop, menyusun struktur arsitektur folder baku, dan mengatur konfigurasi keamanan perangkat. Proses dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan teknis intensif secara *one-on-one* oleh mahasiswa yang mencakup operasional dasar laptop serta administrasi perkantoran digital. Dalam pelaksanaan ini, PKK Desa Purbadana berpartisipasi aktif dengan menyediakan tempat kegiatan, ruang penyimpanan aman, data arsip fisik untuk praktik, serta menunjuk kader muda sebagai penanggung jawab perangkat. Evaluasi keberhasilan program diukur melalui kuesioner *pre-test* dan *post-test*, penilaian praktik pembuatan dokumen digital, serta ketercapaian target minimal 80% peserta yang mandiri mengoperasikan laptop. Sebagai bentuk keberlanjutan program, tim menerbitkan SOP tata cara penggunaan dan perawatan laptop, mengukuhkan kader digital sebagai pengelola aset, serta menyediakan pemantauan berkala secara jarak jauh melalui grup WhatsApp selama 1–2 bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk "*Pemberdayaan PKK melalui Digitalisasi Administrasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Desa Purbadana Banyumas*" dilaksanakan dengan memadukan pendekatan *Techno-Social* melalui kerangka kerja *Participatory Action Research* (PAR) dan prinsip pembelajaran orang dewasa (*Andragogi*). Rangkaian kegiatan ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan mendasar tata kelola administrasi fisik/manual menjadi sistem digital yang terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan.

Implementasi program diawali dengan penataan infrastruktur dan arsitektur digital. Sebelum intervensi dilakukan, pengarsipan dokumen PKK Desa Purbadana sangat rentan terhadap kerusakan dan kehilangan fisik, serta membutuhkan waktu lama dalam pencarian dokumen. Tim pengabdian menyerahkan unit laptop resmi organisasi yang telah dilengkapi dengan sistem operasi dan aplikasi perkantoran terlisensi, diikuti dengan pembentukan

arsitektur folder lokal yang baku. Struktur repositori digital disusun secara hierarkis untuk memisahkan domain kerja organisasi, meliputi:

1. Folder Sekretariat: Berisi arsip Surat Masuk, Surat Keluar, Keputusan Ketua, dan Notulensi Rapat.
2. Folder Bendahara: Berisi Laporan Keuangan, Bukti Transaksi, dan Rekapitulasi Anggaran.
3. Folder Pokja I–IV: Berisi basis data program kerja spesifik (kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan lingkungan hidup).

Guna mendukung keamanan data internal, diterapkan konfigurasi enkripsi dasar serta pengaturan otentikasi akun pengguna (*user account*) bagi pengurus inti. Selain itu, sistem dikoneksikan dengan layanan *Cloud Storage* guna memastikan ketersediaan cadangan data (*backup*) secara berkala. Hal ini selaras dengan konsep *Digital Era Governance* (Panggabean & Meilani, 2023) di mana aksesibilitas dan keamanan data menjadi fondasi utama efisiensi pelayanan publik. Keberlanjutan sistem digitalisasi sangat bergantung pada standarisasi prosedur operasional. Oleh karena itu, tim pengabdian merumuskan dan menyerahkan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Arsip Digital serta Modul Panduan Operasional Perangkat. Penyusunan SOP ini memperkuat tata kelola *soft infrastructure* di pedesaan, sejalan dengan prinsip *Smart Village* (Adheitya et al., 2024) yang mengedepankan keteraturan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset serta dokumen organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu sosialisasi pembentukan pola pikir (*mindset*) dan pelatihan teknis dengan pendekatan pendampingan intensif (*one-on-one*).

Tahap intervensi teknis diawali dengan pelaksanaan forum diskusi interaktif bertajuk "PKK Go Digital: Administrasi Rapi, Kinerja Berprestasi". Forum ini dirancang untuk mengubah pola pikir (*mindset*) para kader dari pendekatan administrasi konvensional menuju budaya digital. Dalam sesi ini, tim pengabdian menyajikan perbandingan komparatif dan visualisasi masalah antara sistem pembukuan manual dengan *E-Administration*:

1. Risiko Sistem Manual: Menyoroti kerentanan arsip fisik berbasis kertas (*hardcopy*) terhadap pelapukan, risiko hilang, serta lambatnya proses pencarian dokumen ketika dibutuhkan dalam penyusunan laporan berkala.

2. Keunggulan Sistem Digital: Menguraikan efisiensi waktu pemrosesan data, kerapian tata kelola dokumen, kemudahan pencarian file (*indexing*), serta keandalan penyimpanan cadangan data berbasis awan (*cloud backup*).

Pendekatan ini berhasil membangkitkan kesadaran kritis para kader akan pentingnya transformasi tata kelola organisasi di tingkat lokal. Setelah pemahaman konseptual terbangun, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan praktik intensif menggunakan metode pendampingan *one-on-one*, di mana setiap kader didampingi secara langsung oleh satu mahasiswa pendamping. Strategi ini diterapkan untuk mengakomodasi variasi tingkat literasi awal peserta melalui tiga tahapan materi terstruktur:

1. Penguasaan Operasional Dasar Perangkat: Kader dilatih mengoperasikan fungsi dasar komputer, seperti penggunaan *keyboard*, navigasi *touchpad*, serta pengelolaan direktori lokal (membuat folder baru, mengubah nama berkas, dan menyusun hierarki pengarsipan yang rapi).
2. Praktik Administrasi Perkantoran Digital: Kader mengaplikasikan keterampilan teknis dengan mengetik format surat resmi organisasi pada aplikasi pengolah kata (*word processor*) serta memasukkan data rekapitulasi keagamaan, kesehatan, dan keuangan warga ke dalam aplikasi lembar kerja digital (*spreadsheet*).
3. Pemanfaatan Storage Awan (*Cloud Storage*): Kader dibimbing untuk mengunggah berkas yang telah selesai dikerjakan ke repositori penyimpanan berbasis awan. Langkah ini bertujuan agar seluruh dokumen sekretariat dan keuangan PKK Desa Purbadana tersip secara terpusat, aman dari risiko kerusakan fisik, serta dapat diakses secara fleksibel oleh pengurus yang berwenang.

Penerapan strategi edukasi berbasis interaksi langsung ini terbukti menjadi instrumen yang sangat krusial dalam mereduksi tingkat kecanggungan teknologi (*tech anxiety*) yang selama ini menjadi hambatan psikologis utama bagi para kader PKK. Melalui pendekatan pendampingan *one-on-one* secara personal dan intuitif, suasana belajar yang inklusif serta suportif berhasil diciptakan, sehingga rasa takut atau ragu dalam mengoperasikan perangkat komputer dapat dikikis secara bertahap. Eliminasi hambatan psikologis ini memberikan ruang bagi para kader untuk membangun rasa percaya diri dalam mengeksplorasi fitur-fitur digital. Alhasil, proses transmisi keterampilan (*transfer of knowledge*) tidak sekadar berhenti pada pemahaman teori, melainkan berlangsung secara interaktif, presisi, dan aplikatif. Kondisi tersebut memastikan bahwa setiap materi tata kelola administrasi digital yang

diajarkan dapat diserap secara optimal dan langsung ditransformasikan menjadi keterampilan praktis dalam mendukung operasional organisasi sehari-hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendekatan *Techno-Social* dan metode *Participatory Action Research* (PAR) berhasil mengoptimalkan pengelolaan administrasi PKK Desa Purbadana dari sistem fisik/manual menjadi sistem berbasis *E-Administration*. Penataan arsitektur repositori digital yang terstruktur, ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata kelola arsip, serta penyediaan infrastruktur teknologi telah menciptakan tata kelola organisasi yang lebih tertib, transparan, dan aman. Intervensi pelatihan dan pendampingan intensif secara *one-on-one* terbukti efektif meningkatkan literasi digital kader PKK secara mandiri, yang secara langsung mendukung pencapaian SDGs 5 (Kesetaraan Gender) dalam pemberdayaan perempuan berbasis teknologi dan SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penguatan *soft infrastructure* pedesaan. Keberlanjutan program ini dijamin melalui pengukuhan kader digital sebagai pengelola aset serta pendampingan berkala secara jarak jauh.

Saran

Untuk memaksimalkan dampak keberlanjutan program di masa mendatang, disarankan agar:

1. Pemerintah Desa Purbadana: Mengintegrasikan sistem *E-Administrasi* PKK ke dalam platform layanan publik atau *Smart Village* tingkat desa secara lebih luas untuk mempercepat pertukaran data warga.
2. Pengurus PKK Desa Purbadana: Melakukan pemeliharaan perangkat dan pembaruan data arsip secara konsisten sesuai SOP yang telah ditetapkan, serta meregenerasi keterampilan digital kepada kader-kader baru.
3. Tim Pengabdi Selanjutnya: Memperluas cakupan modul pelatihan hingga tingkat utilisasi data (misalnya analisis data posyandu atau pembuatan laporan berbasis visual/infografis) serta menginisiasi platform pelayanan publik berbasis *web/mobile* interaktif untuk menjangkau masyarakat desa secara langsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman atas dukungan

pendanaan dan fasilitasi yang diberikan, sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adheitya Widaniyansyah, A., Martiningsih, R. S. P., & Suryantara, A. B. (2024). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(3), 527–537. <https://doi.org/10.29303/risma.v4i3.1277>.
- Bao, B., Ayomi, H. V., Bakri, H., & Ndibau, P. (2023). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura. *Journal on Education*, 5(2), 4147–4157. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1113>.
- Basyo, I., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23–31. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v4i1.477>.
- Fang, Z., & Ph, D. (2002). E-Government in Digital Era : Concept , Practice , and Development. 10(2), 1–22. Farmani, P. I., Adiputra, I. N. M., & Laksmi, P. A. (2021). Perancangan Sistem Informasi Posyandu Sebagai Upaya Digitalisasi Data Posyandu di UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 9(2), 115– 126. <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.311>.
- Hamid, Rahmad Solling, and Muhammad Ikbal. 2017. “Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Remaja Pintar Berbasis Ekonomi Kreatif Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.” *RESONA Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 1(1).
- Kalsum, K., Yamin, A., & Supriyadi, S. (2023). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Seteluk Tengah Kabupaten Sumbawa Barat). *JIIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8417-8422. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3124>.
- Kamilah, F., & Ratnasari, A. (2020). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Posyandu Berbasis Web (Studi Kasus : Posyandu Mandala 2). *Jurnal Sistem Informasi Dan E-Business*, 2(4), 479– 495.
- Kristania, Y. M., & Yulianti, F. D. (2019). Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pada Posyandu Pepaya Purwokerto. *EVOLUSI - Jurnal Sains Dan Manajemen*, 7(1), 68– 75. <https://doi.org/10.31294/evolusi.v7i1.5015>.
- Mulyani, A., Nuraeni, F., & Yuliasri, A. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Posyandu untuk Mendukung Pelaporan Online Berbasis Web. *Jurnal Algoritma*, 19(2), 601–610. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.19-2.1158>.
- Pambudi, M., Susmiyanto, S., & Firharmawan, H. (2023). Pelatihan Komputer Bagi Kader PKK Desa Kaibon. *Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 24– 37. <https://doi.org/10.53863/abdibaraya.v2i01.519>.
- Panggabean, C., & Meilani, N. L. (2023). Digitalisasi Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Aplikasi Pekanbaru Dalam Genggaman Dalam Tinjauan Digital Era Governance). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 721–728. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.622>.

- Prayana, R., & Yuhertiana, I. (2024). Pemanfaatan Layanan Digitalisasi pada KNG (Klampid New Generation) dalam Pengoptimalan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Good Governance di Kelurahan Gunung Anyar. 3(2), 322–328.
- Putri, C. S., & Jatiningih, O. (2020). Pelaksanaan Peran Pkk Dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo. EjournalUNESA, 8(3), 887–901. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/36233>.
- Safitri, L., Huda, D. N., Romdoni, M. R., & Winarni, A. (2025). Optimalisasi Pemberdayaan Kader dan Digitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Lansia dan Balita Kota Tanjungpinang Berbasis Mobile dan Web. Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara, 9(1), 222–230.
- Simanjuntak, P., Realize, R., & Handoko, K. (2019). Pembinaan Administrasi dan Dokumentasi Dengan Memanfaatkan Software Application. Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal,2(2), 132-136. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v2i2.335>.
- Thobias, Erwin, et all (2013), Pengaruh modal sosial terhadap perilaku kewirausahaan; Suatu studi pada pelaku usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal Acta Diurna,edisi April 2013.